



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWIEK RABIATUL ADAWIYAH**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **643118**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m²/56 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 350 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 189 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/510 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m²/52 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/44 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 344.000.000



1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, VARIO 150EX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	125.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.569.521.431
F. HARTA LAINNYA	Rp.	250.000.000
Sub Total	Rp.	10.138.521.431
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.138.521.431

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.